

SEMINAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA

JILID II

SEMINAR HASIL PENELITIAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA



PALEMBANG
17 MARET 2017

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 3 Palembang 302264
Telepon (62-711) 515679, 515581, 515582
Faksimile (62-711) 515581

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT ADHYA TIRTA SRIWIJAYA (ATS) TAHUN 2011-2015 Ade Putri Handayani, Fitriasuri, Ade Kemala Jaya	1
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI) Ahmad Taufik, Poppy Indriani, M. Titan Terzaghi	10
PENGARUH PERUBAHAN PTKP TERHADAP RESTITUSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA PT ALANTEC PRIMA MANDIRI Aprianti, Poppy Indriani, Yeni Widyanti.....	20
ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS PT BANK BRI SYARIAH DI INDONESIA Arfan, Ade Kemala Jaya, Rolia Wahasusmiah.....	28
PENGARUH HUBUNGAN JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2011-2015 Baron Praseyo Buchika, Poppy Indriani, Rolia Wahasusmiah.....	39
EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAPALEMBANG) Beni Febri, Hasan Kuzery, Yeni Widyanti	49
ANALISIS TRANSPARANSI DAN MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PURWOSARI DAN PILIP SATU KARET DI KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN (MUBA) David Sundika, Henni Indriyani, Rolia Wahasusmiah	60
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC PADA BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Detia Okta Herian, Ade Kemala Jaya, Septiani Fransisca.....	75
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KURS MATA UANG,KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN LQ 45 Dona Patrisia, Poppy Indriani, Septiani Fransisca.....	84
ANALISIS PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA KONSTRUKSI DAN KESESUAIAN STANDAR AKUNTANSI KONTRAK KONSTRUKSI (PSAK No. 34) Egi Taris Wihandri, Yeni Widyanti, Rolia Wahasusmiah.....	97

ANALISIS PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Studi kasus pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)	
Endang, Fitriasuri, Yeni Widyanti	106
PENGARUH KOMPONEN ARUS KAS DAN LABA BERSIH TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS LQ 45 BURSA EFEK INDONESIA	
Erwin, Henni Indriyani, M.Titan Terzaghi	114
PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2015	
Fitri Ayu, Henni Indriyani, Andrian Noviardy	124
EVALUASI EMPIRIS KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL TEMUAN AUDIT BPK RI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA SELATAN	
Indah Permata Sari, Verawaty, Septiani Fransisca	134
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2013-2015)	
M. Rahmat Hidayat Muza, Ade Kemala Jaya, Yeni Widyanti	148
PERBANDINGAN PROGRAM TAX AMNESTY ANTARA INDONESIA, CHILI, FILIPINA DAN BELGIA	
Marina, Ade Kemala Jaya, Yeni Widyanti.	166
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN PINJAMAN KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) PADA PT. RAKYAT INDONESIA (PERSERO) UNIT DWIKORA PALEMBANG	
Mita Purwasi, Verawaty, Andrian Novriardy	177
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)	
Moch. Vikram Roza Septian, Hasan Kuzery, Yeni Widyanti	187
PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2011-2015	
Muhamad Alfian, Siti Nurhayati Nafsiah, Ade Kemala Jaya	199
PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA BERBASIS ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) TERHADAP PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT PLN PALEMBANG	
Muhammad Rinaldi, Verawaty, Agus Hendryanto	209
EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	
Mulisa Zakia, Hasan Kuzery, Rolia Wahasusmiah	230

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTASI ZAKAT DAN INFAQ / SEDEKAH PADA BAZNAS SUMSEL Novitasari, Ade Kemala Jaya, Andrian Noviardy	239
KEBIJAKAN SUNSET POLICY JILID II DALAM MENGANALISIS RASIO KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BERDASARKAN UU NOMOR 16 TAHUN 2009 (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat) Novriyan Diman, Hasan Kuzery, Yeni Widyanti	252
PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2013-2015) Okta Rivaldi, Henni Indriyani, Andrian Noviardy	262
EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG Palen Jayanti, Hasan Kuzery, Rolia Wahasusmiah	273
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015) Puteri Bizzaugi, Poppy Indriani, M. Titan Terzaghi.....	286
ANALISI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS TERNAK UNGGUL (Studi Kasus BPTU-HPT Sembawa) Rahmad, Siti Nurhayati, Septina Fransisca.....	302
PENGARUH IMBALAN JASA AUDIT ABNORMAL, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN AUDIT CLIENT TENURE TERHADAP OPINION SHOPPING Restu Pratiwi, Ade Kemala Jaya, Verawaty	309
PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, RISIKO KEUANGAN, STRUKTUR KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN DEVIDEN PAYOUT RATIO TERHADAP INCOME SMOOTHING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010 - 2015 Ricky Naldo Simare Mare, Verawaty, Citra Indah Merina.	318
EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2012-2015 Risna Hardianti, Fitriasuri, Andrian Noviardy	328
REKONSILIASI FISKAL PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. FANTASI JAYA MAKMUR ABADI PALEMBANG Rizkia Novparani, Siti Nurhayati Nafsiah, Yeni Widyanti.....	339
ANALISIS HORIZONTAL LAPORAN POSISI KEUANGAN TERHADAP TRANSISI KEBIJAKAN PENGGUNAAN KWH METER PASCABAYAR KE KWH METER PRABAYAR PT. PLN (PERSERO) AREA PALEMBANG Rizky Aditama, Fitriasuri, Septiani Fransisca	347
ANALISIS PENERAPAN LISTRIK PRABAYAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN KOTA PALEMBANG Rozalia Roleza, Yeni Widyanti, Rolia Wahasusmiah	355

ANALISIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE SEBAGAI PERWUJUDAN GREEN ACCOUNTING Sari Purnama, Henni Indryani, Septiani Fransisca	371
PENGARUH NILAI PERSEDIAAN DAN PROFIT MARGIN TERHADAP MARKET VALUE PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2014-2015 Serly Pertiwi, Poppy Indriani, M.Titan Terzaghi	384
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, EARNINGS MANAGEMENT, TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Setri Ayu Lastari, Verawaty, Citra Indah Merina.....	395
TIMELINESS PELAPORAN KEUANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA: STUDI KOMPARASI DENGAN PELAPORAN KEUANGAN DI SINGAPORE STOCK EXCHANGE Silvia Triyanti, Poppy Indriani, Septiani Fransisca	408
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA YANG MELAKUKAN IPO TAHUN 2014-2015 Suhendar, Henny Indriyani, Citra Indah Merina	420
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA UMKM DI KOTA PALEMBANG Susy Siahaan, Henni Indriyani, Andrian Noviardy	429
DETERMINAN AKSESIBILITAS INTERNET FINANCIAL REPORTING MELALUI E-GOVERNMENT PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA Dela Tri Aprianti, Verawaty, Rolia Wahasusmiah	439
ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK BERDASARKAN METODE RGEC (RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNINGS DAN CAPITAL) PADA BANK BUMN DAN SWASTA YANG TERDAFTAR DI BEI Santoso, Siti Nurhayati Nafsiah, Citra Indah Merina	450

“EVALUASI EMPIRIS KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL TEMUAN AUDIT BPK RI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA SELATAN”

Indah Permata Sari¹, Verawaty², Septiani Fransisca³
Dosen Universitas Bina Darma¹, Mahasiswa Universitas Bina Darma².
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 3 Palembang
Pos-sel: indahdt18@yahoo.com , verawaty_mahyudin@yahoo.com ,
Septiani_Fransisca@binadarma.ac.id

Abstract

This study aimed to examine the effect of the characteristics of the local government (the level of wealth of local government, the level of dependence of local governments on the central government, the shopping area and than the findings of BPK (Republic of Indonesian) to report Performance accountability of Government Agencies and the district town in South Sumatra. Population Research hearts singer that there are 18 provincial governments and district / city. The total sample there are 16 provinces and districts / cities. All of it based on the category selected by using purposive sampling. All of it based on the category selected by using a sampling purposive. The test results of the variables X and Y in this study showed three had no significant effect and a significant effect, namely the level of wealth of local government, the level of dependency of local governments from dependence on the central government and regional expenditure does not significantly influence performance accountability reports of government agencies of provincial and district / city in Southern Sumatra, while the BPK audit findings significant effect on agency performance accountability report.

Keywords: *Characteristics of the local government , the level of wealth of local government, the level of dependence of local governments on the central government, the shopping area and than the findings of BPK Republic of Indonesian, BPK RI audit findings and report Performance accountability of Government Agencies and the district town in South Sumatra.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah (tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, daerah perbelanjaan dan dari temuan BPK Republik Indonesia) terhadap laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dan kabupaten kota di Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini bahwa ada 18 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten / kota, total sampel ada 16 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten / kota. Semua itu berdasarkan kategori yang dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Hasil pengujian terhadap variable X dan Y pada penelitian ini menunjukkan tiga tidak berpengaruh signifikan dan satu berpengaruh signifikan, yaitu tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada ketergantungan pemerintah pusat dan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi dan kabupaten / kota di sumatera selatan, sedangkan temuan audit BPK RI berpengaruh signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi.

Kata Kunci : **Karakteristik pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, daerah perbelanjaan dan dari temuan BPK Republik Indonesia dan laporan akuntabilitas kinerja instansi.**

1. PENDAHULUAN

Peningkatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh desentralisasi fiskal yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk membangun kemandirian dalam memperoleh pendanaan. Pendanaan sendiri akan dapat diterima oleh penyedia

dana (investor dan kreditor), jika pemerintah daerah memiliki akuntabilitas yang baik.

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur dari perwujudan *good governance* yang sedang dilakukan di Indonesia,

karena menurut Suyanto (2010), akuntabilitas merupakan kunci dari konsep *good governance*, untuk mendukung hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, dan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (BPKP, 2007).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN dan RB) mempunyai tugas untuk melakukan penguatan akuntabilitas kinerja instansi-instansi pemerintahan. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui evaluasi (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Inarto, 2013). Tujuan dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah, dan melihat bagaimana komitmen penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk pengelompokan predikat, yaitu kategori AA (memuaskan), kategori A (sangat baik), kategori BB (baik), kategori CC (cukup baik/memadai), kategori C

2. TINJAUAN

2.1.1 Pengertian teori keaganan

Menurut Halim dan Abdullah (2006), teori keaganan merupakan suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama disebut prinsipal dan pihak yang lain disebut

(agak kurang), dan kategori D (kurang). Dalam penelitian ini, evaluasi empiris karakteristik pemerintah daerah yaitu tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, belanja daerah dan temuan audit BPK RI.

Motivasi yang melandasi penelitian ini yaitu peneliti ingin menerapkan penelitian terdahulu yang dilakukan di Jawa Timur dilakukan juga diseluruh pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan untuk melihat apakah terdapat perbedaan dan hasil antara karakteristik pemerintah daerah yaitu tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, belanja daerah dan temuan audit BPK RI terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan selama periode 2014. Yang melandasi penelitian ini yaitu melihat banyaknya pembangunan prasarana publik yang telah dibangun di pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan mulai dari proyek LRT yang berada di Palembang, pembangunan jalan Tol Palembang Indralaya, pembagunan sarana olahraga bertaraf Internasional di Jakabaring serta taman-taman kota yang berada di pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang tersebar di Sumatera Selatan. Semua belanja dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut harus dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatayang bersangkutan.

agen. Prinsipal merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen. Sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak prinsipal.

2.1.2 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Dalam pengertian sempit, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) harus bertanggungjawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan inti filosofis dalam manajemen sektor publik.

2.1.3 Pengertian Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (Abdullah, 2004 dalam Sumarjo, 2010). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.4 Pengertian Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012), tingkat ketergantungan dengan pusat dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut PP Nomor 55 tahun 2005, dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.5 Pengertian Belanja Daerah.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Belanja daerah dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit (Abdulah, 2006).

2.1.6 Pengertian Temuan Audit BPK RI

Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ditetapkan. Menurut Hall (2007), audit adalah bentuk dari pembuktian independen yang dilakukan oleh ahli auditor yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara *internal* bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen.

Audit dilakukan oleh auditor internal dan eksternal. Audit eksternal seringkali disebut sebagai audit independen karena dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) yang independen dari manajemen perusahaan kliennya. Auditor eksternal mewakili berbagai kepentingan pemegang kepentingan pihak ke tiga atas perusahaan, seperti pemegang saham, *kreditor* dan badan pemerintah (Hall, 2007).

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1

Tujuan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Reynaldi Riantiarno dan Nur Azlina (2011).	Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Penerapan akuntabilitas keuangan, ketaatan pada peraturan perundangan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Secara umum variabel penerapan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas tetapi sebaliknya pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Amy fontanella dan Hilda Rossieta (2014).	Pengaruh desentralisasi fiscal dan kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.	Kemandirian daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat serta kinerja penyelenggara pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.	Tingkat kemandirian daerah serta kinerja penyelenggara pemerintah daerah berpengaruh positif tetapi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negative terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012)	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Jepara.	Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Taufeni taufik (2013)	Peran monitoring dan evaluasi terhadap system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.	Peran monitoring dan evaluasi laporan terhadap system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.	Dalam penyelenggaraan Negara pemangku kebijakan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan kepada <i>stakeholders</i> dan dan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dari

			tahun ke tahun mengalami perbaikan.
Ary Suharyanto dan Sutaryo (2016),	Pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Indonesia.	Level kapabilitas APIP, jumlah auditor APIP, jenjang pendidikan auditor APIP, latar belakang pendidikan auditor APIP terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Indonesia.	Level kapabilitas APIP, latar belakang pendidikan auditor APIP, berpengaruh pada akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sedangkan , jumlah auditor APIP, jenjang pendidikan auditor APIP, tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Fandy Nurdin (2013)	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.	Tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanda daerah serta temuan audit BPK RI.	Tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negative, tingkat belanja daerah tidak berpengaruh dan temuan audit bpk tidak berpengaruh, terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

2.3 Hipotesis Penelitian

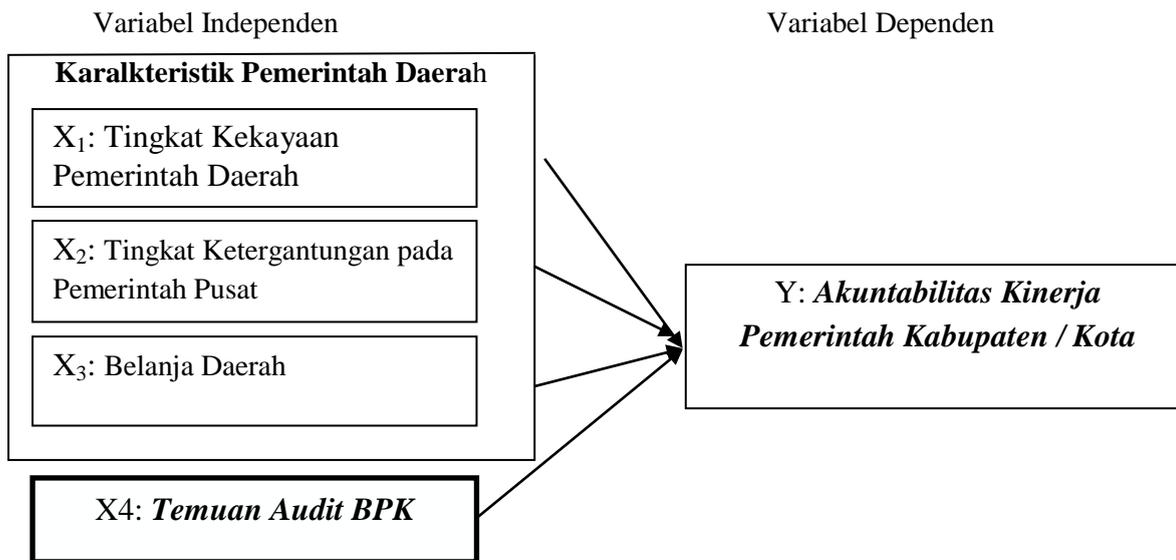
H₁ : Tingkat kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

H₂ : Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

H₃ : Tingkat Belanja Daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

H₄ : Temuan Audit BPK RI berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

2.4 Kerangka Penelitian



3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2014 yang mempunyai laporan keuangan dan variabel penelitian yang di teliti.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi 2014). Populasi penelitian ini mencakup seluruh pemerintah provinsi kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Yang memiliki laporan keuangan, serta laporan yang kecurangan yang ditemukan oleh audit BPK RI sesuai dengan karakteristik pemerintah daerah (tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan

pemerintah daerah pada pemerintah pusat, belanja daerah) dan temuan audit BPK RI, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

3.3 Sumber Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Suryana (2010), data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber yang telah ada. Data penelitian ini berasal dari laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (APBD), data laporan hasil temuan audit BPK RI tahun 2014 serta data laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang disusun pada tahun tahun 2014 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan yang diperoleh dari situs www.djpk.depkeu.go.id, www.bps.go.id dan www.menpan.go.id.

Tabel 3.1
Daftar Populasi

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kotap
1.	Kab. Ogan Komering Ulu	10.	Kab. Ogan Ilir
2.	Kab. Ogan Komering Ilir	11.	Kab. Empat Lawang
3.	Kab. Muara Enim	12.	Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir
4.	Kab. Lahat	13.	Kab. Musi Rawas Utara
5.	Kab. Musi Rawas	14.	Kota Palembang
6.	Kab. Musi Banyuasin	15.	Kota Prabumulih
7.	Kab. Banyu Asin	16.	Kota Pagar alam
8.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	17.	Kota Lubuklinggau
9.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	18.	Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: www.palembangsumsel.go.id

Adapun teknik penentuan sampel alam penelitian ini adalah *Non Probability Sampling* dengan pendekatan *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan syarat dengan kriteria-kriteria sehingga disesuaikan dengan objek penelitian. Dari populasi 18 hanya ada 16 yang dijadikan sampel, jadi data sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 16

sampel. Penelitian ini menggunakan kriteria pengambilan sampel seperti berikut ini:

1. Merupakan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan
2. Memiliki kelengkapan data dan informasi keuangan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti melalui website.

Tabel 3.2
Data Sampel Periode 2014

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Ogan Komering Ulu	9.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
2.	Kab. Ogan Komering Ilir	10.	Kab. Ogan Ilir
3.	Kab. Muara Enim	11.	Kab. Empat Lawang
4.	Kab. Lahat	12.	Kota Palembang
5.	Kab. Musi Rawas	13.	Kota Prabumulih
6.	Kab. Musi Banyuasin	14.	Kota Pagar Alam
7.	Kab. Banyuasin	15.	Kota Lubuklinggau
8.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	16.	Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Data diolah

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Pengertian variabel penelitian menurut Sanusi (2014), adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini adalah skor kinerja yang berasal dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN dan RB) pada tahun 2014. Dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Hasil dari pelaksanaan evaluasi selesai secara keseluruhan, KEMENPAN dan RB memberikan peringkat nilai dengan sebutan:

AA (memuaskan), A (sangat baik), BB (baik), CC (cukup memadai), C (agak kurang), dan D (kurang). Hasil evaluasi berupa skor skala 1-6 dan dikategorikan dalam beberapa rentang penilaian meliputi AA (6), A (5), B (4), CC (3), C (2), D (1).

3.4.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, belanja daerah dan hasil temuan audit BPK RI.

1. Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah

Filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah yang diukur melalui elemen PAD (Haryanto, 2000). Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah,

pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penelitian ini menggunakan realisasi PAD dibandingkan dengan realisasi total pendapatan sebagai proksi untuk mengukur kekayaan pemerintah daerah. Proksi tersebut digunakan agar perbandingan kekayaan antar daerah menjadi merata, karena masing-masing daerah mempunyai realisasi PAD yang beragam tergantung dengan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki daerahnya, sehingga akan tergambar berapa persentase PAD dalam pendapatan daerah. Proksi tersebut dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

2. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Sumber pendapatan bagi pemerintah daerah selain dari PAD adalah dana transfer dari pemerintah pusat. PAD mencerminkan kondisi pembiayaan riil daerah, jika struktur PAD sudah kuat maka daerah tersebut memiliki pembiayaan yang kuat juga, sedangkan DAU dan berbagai bentuk transfer lainnya seyogyanya hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Salah satu dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah adalah dana perimbangan. Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dalam penelitian ini ketergantungan pada pemerintah pusat diproksikan dengan realisasi dana perimbangan dibandingkan dengan realisasi total pendapatan. Proksi tersebut digunakan agar

perbandingan tingkat ketergantungan menjadi merata, karena masing-masing daerah mempunyai Dana perimbangan yang beragam, dengan membandingkan dengan total pendapatan daerah akan tergambar berapa besar persentase dana perimbangan dalam pendapatan daerah proksi tersebut dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

3. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Kepmendagri Nomor 13, 2006). Dalam kaitan akuntabilitas realisasi belanja daerah merupakan penggunaan dari sumber daya keuangan yang diperoleh melalui penerimaan daerah untuk menjalankan program/kegiatan. Dalam penelitian ini belanja daerah adalah realisasi belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

Prinsip keadilan anggaran mewajibkan belanja daerah, khususnya dalam pemberian pelayanan umum harus dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Dengan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran, belanja harus menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang optimal untuk kepentingan masyarakat. Ini bermakna bahwa setiap pos belanja daerah harus dapat diukur kinerjanya.

4. Temuan Audit BPK RI

Output dari pemeriksaan BPK yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang di dalamnya terdapat opini atas LKPD serta temuan-temuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Petunjuk

Teknis Koding Temuan Pemeriksaan, temuan pemeriksaan terdiri dari Temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Temuan Ketidapatutan terhadap peraturan perundang-undangan serta Temuan 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif) (BPK, 2011).

Penelitian sebelumnya dilakukan Hilmi (2012), mengukur temuan audit kepatuhan BPK dengan temuan kepatuhan (dalam rupiah) dibandingkan dengan total belanja, sedangkan Mustikarini dan Fitriyasi (2012), menggunakan temuan kepatuhan (dalam rupiah) dibandingkan dengan total anggaran belanja. Temuan audit BPK penelitian ini menggunakan jumlah temuan

(dalam rupiah) yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam rangkaian pemeriksaan LKPD, dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah. Proksi tersebut digunakan karena temuan audit BPK RI dipengaruhi besaran realisasi belanja, semakin besar belanja maka kecenderungan temuan akan meningkat sehingga dengan membandingkan dengan realisasi belanja akan tercermin berapa persentase temuan terhadap belanja.

Definisi Operasional atas variabel diatas dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Definisi Operasional

Nama Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi.	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (peringkat evaluasi LAKIP).	<i>Ordinal</i>
Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah (X1)	Pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Total Realisasi Pendapatan Daerah. 	<i>Rasio</i>
Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat (X2)	Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Realisasi Dana Perimbangan. Total Realisasi Pendapatan Daerah. 	<i>Rasio</i>
Belanja Daerah (X3)	Realisasi Belanja Daerah merupakan penggunaan dari sumber daya keuangan yang diperoleh melalui penerimaan daerah untuk menjalankan program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Belanja Daerah. 	<i>Nominal</i>
Temuan Audit BPK RI (X4)	pemeriksaan BPK yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang di dalamnya terdapat opini atas LKPD	Jumlah Temuan Audit BPK RI.	<i>Nominal</i>

	serta temuan-temuan hasil pemeriksaan.		
--	--	--	--

4.1 Rancangan Analisis Data

4.1.1 Deskripsi Penarikan Sampel Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan hingga 31 Desember 2014. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan realisasi anggaran tahun 2014, hasil temuan Audit BPK RI tahun 2014, dan data akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2014 yang terdapat dalam *website* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan *website* Badan Pusat

Statistik. Penarikan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah 16 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan hingga 31 Desember 2014 dan 2 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang tidak termasuk dalam sampel penelitian ini adalah Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) dan Kabupaten Penunggal Abab Lematang Ilir (PALI) yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Berikut ini deskripsi penarikan sampel penelitian:

Tabel 4.1
Deskripsi Penarikan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Frekuensi
1.	Merupakan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan	18	100%
2.	Tidak memiliki kelengkapan data informasi keuangan variabel-variabel yang akan diteliti pada website pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.	(2)	(11%)
Jumlah pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota pada Sampel Penelitian		16	89%

4.1.2 Deskripsi Variabel Bebas (*Independent Variable*)

4.1.2.1 Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah (TKPD)

Semakin kaya pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota maka mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan dengan demikian pula sebaliknya. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi pada daerah tersebut. Pada variabel tingkat kekayaan pemerintah daerah cara menentukannya yaitu jumlah realisasi pendapatan asli daerah di bagi dengan total realisasi pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki nilai TKPD tertinggi yaitu Kota

Palembang sebesar 0,25. Adapun pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan nilai TKPD terendah yaitu kabupaten Empat lawang dan Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 0,04. Dari 16 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tersebut nilai rata-rata TKPD sebesar 0,08. Jumlah pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki nilai TKPD di atas rata-rata yaitu ada 4 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan, sedangkan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki nilai TKPD di bawah rata-rata sejumlah 12 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

4.1.2.2 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat (TKPDPP)

Suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat yang rendah. Dengan demikian semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat maka bisa dikatakan daerah tersebut merupakan daerah yang mandiri tidak mengharapkan bantuan pada pemerintah pusat. Pada variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah realisasi dana perimbangan yang dibagi dengan total realisasi pendapatan daerah yang dihitung berdasarkan dengan laporan realisasi anggaran tahun bersangkutan.

Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki nilai TKPDPP tertinggi yaitu Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 0,91. Adapun pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan nilai TKPDPP terendah yaitu Kota Palembang sebesar 0,54. Dari 16 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tersebut nilai rata-rata TKPDPP sebesar 0,79. Jumlah pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera

rata-rata yaitu ada 9 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki nilai TKPDPP di bawah rata-rata sejumlah 7 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota..

4.1.2.3 Belanja Daerah

Belanja daerah menggambarkan perbandingan antara belanja daerah langsung dan belanja daerah tidak langsung. Hal ini mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi apa yang direncanakan. Dengan demikian semakin efisien keuangan daerah maka alokasi belanja daerah tersebut telah tepat. Variabel belanja daerah diukur dengan cara belanja tidak langsung ditambah dengan belanja langsung yang terdapat pada laporan realisasi anggaran pemerintah pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan pada tahun tersebut.

Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki nilai belanja daerah tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 22.445.550.985,-. Adapun pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan nilai belanja daerah terendah yaitu Kota Pagar Alam Rp. 808.211.981 dan Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp. 818.399.354,-. Dari 16 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tersebut nilai rata-rata belanja daerah sebesar Rp. 2.742.901.138. Jumlah pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki nilai belanja daerah di atas rata-rata yaitu ada 3 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki nilai belanja daerah di bawah rata-rata sejumlah 13 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di.

4.1.2.4 Hasil Temuan Audit BPK RI (HTA BPK RI)

Hasil temuan audit BPK RI adalah himpunan data dan informasi yang

melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Semakin banyak temuan audit maka semakin banyak tinggi pula tingkat akuntabilitas pemerintah Provinsi dan

Selatan tersebut .

Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki hasil Temuan Audit BPK RI tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Selatan yaitu memiliki 23 hasil temuan audit BPK RI. Adapun pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan hasil temuan audit BPK RI terendah yaitu Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Musi Rawas sebesar 11 hasil temuan audit BPK RI. Dari 16 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tersebut nilai rata-rata 17 hasil temuan audit BPK RI. Jumlah pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki hasil temuan audit BPK RI di atas rata-rata yaitu ada 7 pemerintah Provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota, sedangkan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki hasil temuan audit BPK RI di bawah rata-rata sejumlah 9 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

4.1.3 Deskripsi Variabel Terikat (Dependent Variable)

4.1.3.1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan akuntabilitas kinerja yaitu dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji karakteristik pemerintah daerah dan hasil temuan audit BPK RI terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin kaya pemerintah daerah tersebut maka akan semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas (pertanggungjawaban) daerah tersebut kepada pemerintah pusat atas hasil kekayaan daerah tersebut. Namun, hasil evaluasi empiris pada penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditolak.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh signifikan negatif terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah tersebut dengan dana

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.

Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tertinggi yaitu pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau sebesar 3. Adapun pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan nilai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terendah yaitu Kabupaten Empat Lawang sebesar 1.

APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada daerah tersebut. Namun, hasil evaluasi empiris pada penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditolak.

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis belanja daerah memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Alasan karena semakin tinggi tingkat belanja daerah baik belanja langsung atau pun belanja tidak langsung menggunakan dana APBD pada daerahnya maka akan semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas (pertanggungjawaban) pada pemerintah pusat atas pengeluaran belanja daerah pada pemerintah daerah tersebut. Namun, hasil evaluasi empiris pada penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis belanja daerah berpengaruh terhadap pengalokasian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditolak.
4. Berdasarkan hasil uji hipotesis hasil temuan audit BPK RI memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin banyak tingkat temuan audit yang dilakukan oleh lembaga independen Negara BPK RI terhadap daerah tersebut maka akan semakin tinggi pula tingkat

akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut atas laporan hasil temuan tersebut. Namun, hasil evaluasi empiris pada penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis hasil temuan audit BPK RI berpengaruh negatif terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data tahun 2014, dan hanya meneliti satu provinsi saja yaitu semua pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Penelitian selanjutnya agar menggunakan tahun yang lebih baru dan lebih panjang serta penambahan tidak hanya satu provinsi saja tetapi semua provinsi yang ada di Indonesia. Selain dengan periode yang lebih panjang dan

provinsi yang lebih banyak sehingga diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang lebih baik.

2. Penelitian ini menggunakan variabel karakteristik pemerintah daerah yang digambarkan melalui tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, belanja daerah serta hasil temuan audit BPK RI tahun 2014. Variabel tersebut hanya menjelaskan sebagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian berikutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih variatif seperti opini atas LKPD, indikator kinerja kunci (IKK), serta tidak hanya melihat dari data keuangan tetapi variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja, misalnya kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan LAKIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Rusdi., Pilcher, Robyn dan Perrin, Brian. 2012. *Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government*. Pasific Accounting Review (Vol. 24 No. 3: 262-291).
- Aliyah, Siti dan Nahar, Aida. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Asektabililitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparasi Akuntabilitas Pengolaan Keuangan Daerah Jepara. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.2011. Penyajian Laporan Keuangan.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012. *Deskripsi dan Analisis APBD 2012*.
- Fontanella, Amy dan Rossieta, Hilda. 2014. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 17. (<http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id>, diakses pada 24 Oktober 2016).
- Green, Keith. 2005. *Decentralization and Good Governance: The Case of Indonesia*. Munich Personal RePEc Archive Paper, <http://mpra.ub.uni-muenchen.de>. Diakses tanggal 23 oktober 2016.
- Hall, James. 2007. *Pengaruh Profesionalisme Auditor, Independensi Auditor, Etika Profesi, Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali*.
- Halim, Abdul dan Abdullah, Syukriy. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah*. <http://www.bppk.depkeu.go.id>
- Haryanto, Tri Joko. 2000. *Kemandirian Daerah:Sebuah Perspektif dengan*

- Metode Path Analysis*. Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<http://www.fiskal.depkeu.go.id>, diakses pada 22 November 2016)
- Hartoyo, Nafsi. 2014. *Optimalisasi PAD untuk Peningkatan Kinerja Pemda*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan (<http://www.bppk.depkeu.go.id>, diakses pada 23 Oktober 2016)
- Hilmi, Zul, Amiruddin dan Martani, Dwi. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. Forum: Simposium Nasional Akuntansi 15. (<http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>, diakses pada 23 Oktober 2016).
- Inarto, Agoes. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN). (<http://www.stialan.ac.id>, diakses pada 24 Oktober 2016).
- Julitawati, Ebit. Darwanis dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1 (1), pp; 15-29.
- Liestiani, Annisa. 2008. *Pengungkapan LKPD kabupaten/kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006*. Skripsi Sarjana.FEUI. Depok.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mimba, Putu, Ni. Helden, G Jan dan Tillema, Sandra. 2007. *Public Sector Performance Measurement in Developing Countries*. *Journal of Accounting and Organizational Change* (Vol. 3, No. 3; 192-208). (<http://media.proquest.com>, diakses pada 23 Oktober 2016).
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriasisi, Debby. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Forum: Simposium Nasional Akuntansi.
- Nugroho, Fajar. 2012. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Nurdin, Fandy. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Peraturan Perundangan Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Peraturan Perundangan Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Primbangan.
- Puspita, Rora dan Martani, Dwi. 2012. *Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda*. Forum: Simposium Nasional Akuntansi 15. (<http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>, diakses pada 22 November 2016).
- Riantiarno, Reynaldi dan Azlina, Nur. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Pekbis Jurnal* (Vol. 3, No. 3; 560-568)
- Rusmin, Rusmin. Astami, W Emita, dan Scully, Glennda. 2014. *Local Government Unit in Indonesia: Demographic Attributes and Differences in Financial Condition*. *Australasian Accounting Business and Financial Journal* (Vol. 8, No. 2)
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sudarsana, Susila Hafidh. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*. 2 (4), pp: 1-13.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suharyanto, Ary dan Sutaryo. 2016 *Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia*. (<http://media.proquest.com>, diakses pada 23 Oktober 2016).
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah*

- Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*). Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Suyanto 2010. *Menyoal Desentralisasi Fiskal: Mempertanyakan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIALAN). (<http://www.stialan.ac.id>, diakses pada 21 oktober 2015).
- Tarigan, Antonius. 2009. *Urgensi Penguatan Keuangan Daerah – Suatu Tinjauan terhadap Regulasi Daerah dan Implikasinya dalam Penyediaan Pelayanan Publik*. (<http://www.bappenas.go.id>, diakses pada 23 Oktober 2016)
- Taufik, Taufeni 2013. Peran Monitoring dan Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Wicaksono, Gunawan. 2008. *Pengurangan Disparitas Pembangunan Ekonomi Regional melalui Desentralisasi Fiskal*. Majalah Triwulanan BPK RI Edisi April-Juni 2008 (No. 112; 24-26).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. www.bpk.go.id Diakses tanggal 21 oktober 2016
- www.menpan.go.id Diakses 21 oktober 2016
- www.djpk.depkeu.go.id Diakses tanggal 21 oktober 2016
- www.bps.go.id Diakses tanggal 21 oktober 2016

